

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah mewujudkan peserta didik menjadi warga negara yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan hidup, cerdas, tangguh, kreatif, mandiri dan demokratis. Untuk mengembangkan kekuatanmu, bertanggung jawab, sosial dan nasional. Pentingnya sebuah sekolah tidak hanya tercermin dari ukuran fisiknya, tetapi juga dari fasilitas dan jumlah kegiatan ekstrakurikuler yang ditawarkan. Untuk memahami mutu pendidikan sekolah formal, perlu dipahami pendidikan sekolah formal sebagai suatu sistem yang utuh.

Pakar serta pengamat pemerintahan dan pendidikan berupaya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan menengah melalui banyak referensi dan konferensi, seminar dan kegiatan pengajaran, yang melibatkan integrasi sumber daya, penerapan pengetahuan, pengembangan keterampilan dan kesejahteraan guru, serta pemerataan pendidikan. Pengembangan kurikulum, serta menaikkan kompetensi guru melalui kegiatan kelompok mengajar atau musyawarah guru mata pelajaran. Diantara berbagai hal penting untuk meningkatkan pendidikan, salah satu hal terpenting yang kita semua pikirkan adalah kemampuan guru dalam mengikuti perubahan dan tren zaman. Karena jika tidak mengikuti tren zaman maka kualitas guru akan tertinggal dan

akan sulit mengikuti perkembangan kemampuan dan tuntutan peserta didik dan dunia kerja.

Pada akhir tahun 2019, ada kebijakan baru yang dilakukan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan yang sekarang menjadi kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi yaitu mencanangkan program merdeka belajar. Program merdeka belajar oleh kemendikbudristek sampai saat ini telah sampai pada episode yang ke 22. Dimana tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan jumlah kesesuaian antara lulusan yang dihasilkan satuan pendidikan dengan kebutuhan industri, dunia usaha, dan dunia kerja serta perubahan kebutuhan kompetensi kerja kedepan yang semakin cepat berubahannya.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 jelas disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Menurut Undang-Undang tentang sistem pendidikan nasional pada Pasal 5 ayat 1, setiap warga negara mempunyai hak yang sama atas pendidikan yang bermutu. Menurut aturan yang ada, jelas bahwa setiap peserta didik tidak hanya mendapatkan jalur untuk mendapatkan proses pendidikan saja, tetapi juga mendapatkan hak atas kualitas pendidikan yang sama.

Tujuan penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional (SPN) yaitu menjamin jalur dan kualitas pendidikan. Lebih lanjut, salah satu muatan undang-undang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional harus menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan meningkatkan mutu, kecukupan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan guna menjawab tantangan. Serta mungkin kita perlu melakukan reformasi

pendidikan secara terencana, tepat sasaran, dan berkelanjutan untuk memenuhi percepatan perubahan kebutuhan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Tentang proses penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas menjadi kewajiban pemerintah yang tertuang secara lebih terperinci pada beberapa aturan antara lain: aturan mengenai proses penyelenggaraan pendidikan, yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), selanjutnya dibuat turunannya aturan tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), serta harapan kualitas guru yang diajmin dan diatur dalam undang undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen selanjutnya diterbitkan turunannya dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 74 Tahun 2008 mengenai guru kemudian berganti menjadi peraturan pemerintah nomor 19 Tahun 2017 membahas hal yang sama mengenai guru, meningkatkan kemampuan managerial kepala sekolah dan pengawas sekolah diatur secara detail pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PERMENDIKBUD) nomor 36 Tahun 2019 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PERMENDIKBUD) nomor 6 Tahun 2018 tentang pemberian tugas guru menjadi kepala sekolah (Zamzani dkk, 2020).

Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (KEMENDIKBUDRISTEK) melakukan inovasi mengenai merdeka belajar bertujuan untuk melakukan akselerasi kualitas pendidikan di Indonesia. Inovasi ini adalah langkah berani dari KEMENDIKBUDRISTEK yang dianggap menjadi program strategis dan unggulan serta merupakan tantangan besar

dalam dunia pendidikan untuk terus melakukan perubahan. Memaknai merdeka belajar adalah kebebasan untuk seluruh bagian pendidikan (satuan pendidikan, tenaga pendidik, serta peserta didik) dalam melakukan kemandirian untuk berinovasi dan mengembangkan kreatifitas. Pada merdeka belajar terdapat empat (4) kebijakan besar yang telah dikeluarkan oleh KEMENDIKBUDRISTEK yaitu: penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) berganti menjadi ujian Asesmen Nasional (AN) yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan masing-masing, pergantian UNBK yang sebelumnya mengukur kelulusan seluruh peserta didik kelas XII menjadi Asesmen Nasional yang mengukur Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Lingkungan Belajar, dan Survei Karakter. Selanjutnya tenaga pendidik memperoleh kemudahan dalam mengembangkan format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Kemudian terjadi perubahan tentang seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sebelumnya zonasi menjadi pembagian presentasi yang lebih elastis agar dapat menyesuaikan kondisi di daerah yang berbeda-beda (Wijaya dkk, 2020).

Program merdeka belajar diluncurkan salah satu yang menjadi program unggulan pada SMK adalah Center Of Excelent (COE) dilanjutkan dengan SMK Pusat Keunggulan (PK). Program sekolah pusat keunggulan ini bertujuan untuk memfasilitasi setiap satuan pendidikan untuk menciptakan generasi pembelajar sepanjang hayat yang siap kerja, santun, mandiri dan siap berwira usaha (Setyawan & Masduki, 2021). Selain itu juga, hal ini merupakan gagasan dari pemerintah melalui kemendikbudristek untuk mereformasi kualitas pendidikan di Indonesia. Sesuai dengan yang dipaparkan oleh Menteri

Pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi Nadiem Makarim bahwa reformasi pendidikan tidak dapat dilakukan hanya dengan memanfaatkan *administrasi approach*, tetapi juga harus menerapkan *culture transformation* (Satriawan, dkk, 2021).

Pada abad ke 21 menuntut tiap tenaga kerja memiliki kompetensi yang mencakup kemampuan yang luas berupa kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diarahkan pada kesesuaian dibutuhkan serta minat dan bakat peserta didik pada satuan pendidikan, IDUKA, dan berwirausaha (Bamalli, 2013). Sepadan dengan kondisi Revolusi Industri 4.0 yang menuntut pergeseran kompetensi kerja, hal ini menjadi pekerjaan besar bersama antara pemerintah dan masyarakat khususnya layanan sektor pendidikan (Hendra, 2017). Prioritas utama saat ini yaitu meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan, tujuannya untuk menghasilkan tamatan yang siap bersaing di pasar kerja local, nasional dan global (Baro'ah, 2020).

berbagai tantangan dan permasalahan yang kompleks saat ini menjadi tantangan tersendiri untuk dunia informasi dan teknologi pendidikan yang terus berkembang belakangan ini. Belakangan ini usaha dalam meningkatkan kualitas pendidikan tetap diupayakan oleh seluruh pihak, semua hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan pola fikir bangsa (Mulyasa, 2010). Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan menjadi tujuan pembangunan dibidang system pendidikan nasional, serta menjadi bagian satu kesatuan dari usaha peningkatan mutu masyarakat Indonesia seutuhnya, dan menyeluruh. Kualitas pendidikan adalah bagian dari sektor penting yang wajib diterapkan pada pelaksanaan pendidikan. Upaya

pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan ialah dengan mengusulkan kebijakan kurikulum merdeka belajar melalui link and match pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Kurikulum satuan pendidikan yang digunakan pada saat ini telah diatur oleh menteri pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi yaitu kurikulum merdeka belajar. Gagasan kurikulum merdeka belajar yang telah diluncurkan mengarahkan pada memberikan keleluasaan pada sektor pendidikan (Faiz dkk 2020). Pada perkara ini, tenaga pendidik tidak hanya berperan sebagai tutor, tetapi juga berperan sebagai fasilitator untuk peserta didik dalam proses belajar mengajar. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas di bagian pendidikan harus direncanakan dengan matang agar bermacam kondisi hambatan dan permasalahan yang terjadi mampu ditangani dan diselesaikan dengan baik. Program pendidikan nasional harus direncanakan sedemikian rupa supaya dapat menciptakan generasi yang mempunyai kelebihan pada era informasi dan teknologi seperti saat ini, era 4.0 merupakan era industri yang menjadi peluang besar sekolah-sekolah kejuruan untuk merekonstruksi kurikulum yang dapat beradaptasi dengan kebutuhan saat ini. Pendidikan kejuruan bertujuan untuk mengajarkan kompetensi kerja kepada siswa yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri (Gultom, 2022)

Pendidikan kejuruan juga bertujuan mempersiapkan lulusan yang adaptif terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi, sehingga aspek *sustainability development* pendidikan kejuruan dapat terpenuhi. Abad 21 saat ini mendorong peningkatan kemajuan pengetahuan serta teknologi terbarukan terus bermunculan, sebagian contoh terbesar dan sangat populer adalah era

revolusi industri 5.0. Era ini dikenal sebagai era digitalisasi berbasis *cyber* yang merambah di hampir segala bidang. Berbagai peluang dan tantangan hadir sebagai dampak munculnya era tersebut. Disrupsi pekerjaan lama dan digantikannya dengan pekerjaan baru, menjadi peluang dan tantangan terbesar dalam 5.0, Dengan demikian, hadirnya jenis pekerjaan baru dengan karakteristik yang baru, maka akan membutuhkan kompetensi yang baru juga.

Penerapan kurikulum Merdeka Belajar di SMK dapat membantu lulusan SMK lebih mudah mendapatkan pekerjaan, penerapan modul yang diajarkan di sekolah dengan modul yang sama ditempat praktek siswa-siswa SMK akan dapat memberikan kemudahan dalam menerapkan materi yang diajarkan guru pada saat siswa melakukan praktek lapangan. Merdeka secara kurikulum membutuhkan kerja keras kepala sekolah dan tim guru membangun relasi dengan dunia industri, kebutuhan dunia industri dapat menjadi masukan yang positif bagi SMK untuk dapat menyesuaikan skill atau keahlian SMK dengan kebutuhan Lapangan Pekerjaan, kurikulum merdeka harus mengacu pada kompetensi dan skill dilapangan, dunia industri sebagai pengguna lulusan SMK akan terbantu dan saling melengkapi apabila ada konektifitas antara kurikulum di SMK dengan skill atau keterampilan yang dibutuhkan dunia industri. Sejalan dengan itu kementerian pendidikan, riset, dan teknologi, kementerian perindustrian, kementerian tenaga kerja bersama-sama melalui SKB 3 menteri menargetkan sejumlah 2.600 SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) serta sejumlah 750 perusahaan yang akan dilibatkan pada program pendidikan vokasi melalui *link and match* yang dilaksanakan tahun 2019.

Akan tetapi, sampai pada tahap ke-10 pelaksanaan program ini, Satuan pendidikan dan perusahaan yang terlibat mampu melewati target yang dicanangkan sebelumnya. Dimana sejumlah 2.604 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta 885 perusahaan yang terlibat aktif. Dalam hal itu, ketiga kementerian mempersembahkan penghargaan dan rasa hormat sebesar-besarnya kepada para pihak perusahaan dan stuan pendidikan yang sangat antusias dan mensupport dan merespon serta berperan serta untuk mensukseskan program strategis pemerintah ini, hal ini disampaikan Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian pada momen Peluncuran Program Pendidikan Vokasi *Link and Match* Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan perusahaan yang berada di wilayah Jawa Barat bertempat di PT. AIBM (Anugerah Indofood Barokah Makmur), Sukabumi (2019).

Sejalan dengan program strategis pemerintah tersebut, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Bidang Bangunan Dan Listrik (BBL) Medan juga melaksanakan rapat koordinasi kemitraan BBPPMPV BBL, satuan pendidikan, LKP, dan DUDIKA. Rapat koordinasi tersebut dihadiri 19 SMK, 1 LKP, dan 17 DUDIKA guna menyepakati bersama kecocokan kopetensi kerja yang ada di DUDIKA dan capaian pembelajaran yang ada di satuan pendidikan. Hingga akhir dari rapat koordinasi kemitraan tersebut menghasilkan kesepakatan dan penandatanganan perjanjian kerjasama guna untuk memajukan pendidikan vokasi melalui satuan pendidikan SMK. Kegiatan rapat koordinasi kemitraan ini dilaksanakan mulai tanggal 23 s.d 25 agustus 2023, bertempat di hotel sapadia pematangsiantar.

Kemudian untuk seluruh kepala SMK juga harus mampu lebih giat dan proaktif untuk menambah kemitraan strategis atau *link and match* dengan industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Proses pelaksanaan pendidikan vokasi pada satuan pendidikan baik SMK, LKP, maupun perguruan tinggi yang *link and match* dengan perusahaan menjadi keniscayaan yang tidak dapat dihindarkan dan wajib disegerakan guna menyiapkan sumber daya manusia atau lulusan. Keberhasilan program ini akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang kompeten, dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi dengan jumlah tenaga kerja yang kompeten terserap secara meningkat. Pendidikan vokasi diharapkan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan industri dengan ketersediaan tenaga kerja yang terampil. Perkembangan dan pertumbuhan industri sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat.

Pemerintah juga percaya bahwa dengan tersedianya tenaga kerja yang terampil akan meningkatkan daya saing dan pertumbuhan industri nasional. Terutama bagi mereka yang mampu dan menguasai teknologi digital yang menjadi kebutuhan perkembangan industri 4.0 pada era ini. Hal ini akan mendorong perusahaan dalam negeri untuk lebih memacu untuk mampu bersaing dengan perusahaan di pasar global. Semua ini bertujuan untuk mencapai peta jalan pertumbuhan industry 4.0 Indonesia kedepannya. Untuk imbal balik bagi perusahaan dan industri yang berkenan berperan aktif untuk kemajuan pendidikan vokasi.

Direktorat vokasi bahkan menyatakan kemitraan antara pendidikan vokasi dengan industri tidak hanya sebatas link and match. Tetapi sudah

seharusnya disebut dengan perkawinan antara pendidikan vokasi dengan industry, dunia usaha, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut untuk menggambarkan betapa sangat penting dan seriusnya untuk mewujudkan kemitraan yang strategis antara pendidikan vokasi dengan IDUKA. Memang dapat kita sadari masi banyak pimpinan satuan pendidikan dan pimpinan perusahaan yang masi kurang respon terhadap pentingnya program kemitraan tersebut, dimana maju dan mundurnya pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Tetapi tanggung jawab semua kalangan sebagai bagian berbangsa dan bernegara, dengan tanggung jawab dan peran yang berbeda sesuai kapasitas dan kemampuan yang dimiliki masing-masing.

Proses pendidikan vokasi merupakan pengembangan yang berkelanjutan dan diharapkan mampu beradaptasi akan perkembangan di masa 4.0, dimana pada masa ini jelas membutuhkan keterampilan kerja baru untuk memasuki dunia kerja dan wirausaha. walaupun karakteristik setiap industri berbeda-beda serta tidak merata, tetapi perlu dilakukan rencana dalam mempersiapkan harus dilakukan sesegera mungkin (Sasmoko, 2020). Usaha untuk merevitalisasi pendidikan vokasi terus dilaksanakan oleh pemerintah melalui kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi untuk melakukan percepatan melalui program SMK Pusat Keunggulan (SMK PK). Guna menjawab tantangan dan peluang yang terjadi pada era saat ini. Perubahan capaian pembelajaran berdasarkan kompetensi kerja yang dibutuhkan industri 4.0 menjadi salah satu upaya dalam memenuhi permintaan dan tuntutan keterampilan yang ada dalam era 4.0 (Made Sudana, 2019).

Berbagai upaya pengembangan pembelajaran telah dilakukan, namun permasalahan kompetensi siswa masih terus terjadi. Hasil belajar siswa yang rendah menjadi persoalan mendasar yang belum terselesaikan di pendidikan vokasional (Mutohhari, 2021:7). Selain itu motivasi dan efikasi yang menjadi modal utama dalam belajar juga rendah, sehingga keaktifan dan kreativitas belajar siswa juga masih rendah. Permasalahan ini tentunya tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, masih adanya guru yang belum memahami terkait kemampuan dan keterampilan yang diharapkan oleh IDUKA nantinya akan dapat menjadi persoalan yang kompleks. Selain itu, Integrasi teknologi terkini sesuai dengan perkembangan masih sedikit dilakukan, sehingga minat belajar siswa rendah.

Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan vokasi mencerminkan keprihatinan dan dinilai: (a) Belum mampu mendongkrak keterampilan peserta didik lebih maksimal, (b) Belum mampu melaksanakan Proses Belajar Mengajar (PBM) yang menyenangkan, (c) Belum mampu melahirkan tamatan yang memiliki kredibilitas ahlak. Persentasi tamatan SMK belum mampu mencukupi standar kebutuhan industry, dunia usaha, dan dunia kerja (Made Sudana, 2019). Kualitas tamatan SMK belum mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja, akses sarana dan prasarana sekolah menengah kejuruan belum mencukupi, serta manajemen SMK yang berlaku masih belum lancar untuk menjalankan regulasinya sendiri.

Satuan pendidikan yang mengelola pendidikan vokasi dapat berjalan efektif dalam mempersiapkan prosesnya apabila telah melakukan link and match. Melalui proses penyusunan kurikulum dan modul pembelajaran secara bersama, dengan melibatkan industry, dunia usaha dan dunia kerja. Maka

capaian pembelajaran yang diharapkan dapat memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Sehingga tamatan SMK dapat menjadi calon tenaga kerja yang mumpuni sesuai dengan kebutuhan pasar kerja melalui kurikulum dan modul ajar yang disusun bersama antara SMK dengan IDUKA.

Satuan pendidikan yang efisien dapat diartikan, mana yang bagus, dan mana yang tepat. Idealnya proses pembelajaran harus mengacu pada 8 standar nasional pendidikan, dengan menyesuaikan kondisi daya dukung lingkungan sekitar dan tantangan lingkungan sekitar. Sehingga proses layanan pendidikan dapat segera berkembang dengan berbarengan pertumbuhan industri serta perusahaan sekitar. Perlunya mempertimbangkan kearifan lokal atau kondisi lingkungan sekitar, dapat mendorong proses percepatan untuk mengimbangi kebutuhan keterampilan kerja dengan dibekali sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan SKKNI kekinian.

Pendidikan vokasi memiliki tujuan agar: (a) Dapat mencukupi keinginan tamatan akan keterampilan kerja, (b) Mengembangkan keinginan pendidikan untuk masing-masing orang, dan (c) Melecut tekad untuk mengembangkan diri terus menerus. Pendidikan kejuruan memiliki arah secara spesial adalah untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, inovasi, kemandirian, santun, serta siap kerja sesuai dengan kebutuhan industry, dunia usaha, dan dunia kerja (Segiovani, 2010).

Supaya mampu bekerja secara efektif dan efisien, satuan pendidikan vokasi atau SMK harus terus menerus mengembangkan capaian pembelajaran dan keterampilannya serta memiliki mental bekerja yang baik, memiliki kemampuan pada dirinya pada kompetensi kerja nasional, mempunyai

semangat kerja yang unggul, dapat berkomunikasi dengan baik sesuai akan tuntutan lingkungan dan kebutuhan pekerjaannya, dan terus menerus meningkatkan kemampuan pengembangan diri.

Literasi pembelajaran berbasis kompetensi abad 21 dan industri 4.0 menjadi kunci penting untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada guru terkait pengelolaan pembelajaran tersebut (Kozuh, 2021). Dengan literasi yang baik, guru sebagai pengelola dan fasilitator pembelajaran dapat mengetahui capaian pembelajaran apa saja yang sebaiknya dimiliki oleh peserta didik untuk menghadapi derasnya perubahan di era 4.0 (Astuti, 2021). Selain itu, kepedulian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga sangat penting dilakukan. Dengan kepedulian yang baik, maka literasi juga akan perlahan terbangun dengan sendirinya (Mutohhari, 2021).

Salah satu agenda reformasi pendidikan adalah dengan pemindahan wewenang serta keharusan penyelenggaraan pendidikan pada pemerintah kabupaten untuk pendidikan menengah atas ke pemerintah provinsi yang tertuang pada undang undang nomor 23 tahun 2014. Pada regulasi tersebut mengatur bahwa satuan pendidikan memiliki wewenang mengenai aspek kurikulum, proses pembelajaran, asesmen, sarana dan prasarana serta kelengkapan pendukung penyelenggaraan pendidikan (Rosyada, 2013).

Kewenangan dan tanggung jawab yang diamanhkan kepada satuan pendidikan seperti yang telah diamanatkan pada Undang Undang SISDIKNAS tersebut, menjadi sesuatu hal yang perlu dimanfaatkan pada satuan pendidikan. Justru berdasarkan jaminan Undang Undang SISDIKNAS tersebut, satuan pendidikan harus mampu mengembangkan kreatifitas, dan inovasinya dalam

meningkatkan proses layanan pendidikan pada seluruh peserta didiknya dan *stake holder* terkait dalam menetapkan sendiri arah kebijakan yang dianggap paling sesuai agar dapat diterapkan pada satuan pendidikannya dengan menyesuaikan kebutuhan peserta didik serta kekhasan lingkungan sekitar satuan pendidikan.

Kepala Sekolah sebagai managerial pada satuan pendidikan memiliki kapasitas yang sangat besar dalam tercapainya keberhasilan pada satuan pendidikan (Fitrah, 2017). Kepala sekolah atau manager pada satuan pendidikan adalah pejabat tertinggi pada sebuah lembaga pendidikan. Target yang menjadi acuan pendidikan dapat tercapai dengan maksimal berdasarkan kemampuan managerial, kecakapan, serta kebijaksanaan pada saat memimpin sebagai kepala sekolah.

Berdasarkan kewenangan profesional tersebut, peningkatan kapabilitas dan profesionalisme guru dapat dengan mudah dikerjakan, dikarenakan dapat menyesuaikan dengan fungsi managerial kepala sekolah dalam menahkodai satuan pendidikan yang dipimpinnya. Seni dalam menahkodai satuan pendidikan harus dapat menggerakkan seluruh system dan manajemen yang ada pada satuan pendidikan, agar gerak maju pendidikan pada satuan pendidikan yang dipimpin dapat sesuai dengan visi dan misi yang telah disusun dan disepakati bersama seluruh warga satuan pendidikan.

Guna menggapai tujuan pendidikan tersebut, maka dilakukannya peningkatan keterampilan tenaga pendidik pada satuan pendidikan melalui workshop, pelatihan, serta pendampingan yang konferhensif untuk mencapai tujuan dan visi yang sama di era 4.0 saat ini, perlu adanya peningkatan jaringan

kerjasama antara sekolah untuk masalah ini sekolah menengah kejuruan atau SMK dengan dunia Industri dan dunia usaha agar dapat secara signifikan menguji kemampuan dan kompetensi siswa-siswa SMK yang tangguh dan dapat mengikuti perkembangan dunia kerja di era 4.0.

Berdasarkan observasi wawancara bulan Mei 2022 yang peneliti peroleh dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Lima Puluh menunjukkan fakta terkait Penerapan Kurikulum merdeka Belajar sebagai berikut:

1. Pengelolaan SDM dalam hal ini guru terus dilakukan peningkatan dengan mengikutsertakan guru dalam program merdeka belajar, keikutsertaan ini menjadi komitmen guru untuk dapat mengembangkan potensi sekolah agar dapat terus berinovasi dan berkontribusi di era 4.0 untuk pengembangan SMK yang efektif terkoneksi dengan IDUKA di Kabupaten Batu Bara.
2. Kerjasama antara SMK dan IDUKA secara bertahap dilakukan komunikasi oleh Kepala Sekolah untuk menentukan dan menguji kompetensi lulusan SMK yang siap Kerja dan Kompeten, walaupun belum terlalu banyak tapi setidaknya konsolidasi tersebut terus dilakukan oleh Kepala Sekolah untuk menambah jaringan atau koneksi kerja dengan SMK Negeri 1 Lima Puluh.
3. Pengelolalan Kurikulum yang disesuaikan akan harapan masyarakat Industri, Dunia Usaha, dan Dunia Kerja (IDUKA), tentunya ini dapat diukur ketika siswa melakukan program magang, pihak sekolah berusaha menyesuaikan modul belajar dengan modul praktek di tempat magang.
4. Belum terdapatnya sinkronisasi kurikulum antara SMK Negeri 1 Lima Puluh dengan IDUKA yang relevan, dimana pada kurikulum merdeka Belajar

sekolah dituntut dapat menyesuaikan kurikulum SMK dengan kebutuhan IDUKA dengan konsep penyusunan bersama.

5. Ketua Program Studi belum melakukan pemetaan analisis Capaian pembelajaran dari setiap mata pelajaran yang benar-benar penerapannya setara dengan keinginan IDUKA, Serta menghapus Capaian pembelajaran dari setiap mata pelajaran yang sudah tidak relevan dengan keinginan IDUKA.
6. Tidak semua guru mata pelajaran memahami tentang konsep penerapan kurikulum merdeka belajar, serta belum terpenuhinya standar minimal jumlah asesor kompetensi pada guru disetiap kompetensi keahlian dimana hal tersebut sebagai prasyarat untuk terbentuknya Tempat Uji Kompetensi (TUK) dari LSP P1 maupun LSP P3.
7. Penerapan kurikulum merdeka belajar banyak mengalami kendala dengan berbagai kondisi yang terjadi pada saat ini, dimana pola belajar dan sistem pembelajaran masi terbatas. Guru-guru belum dapat mempersiapkan pembelajaran yang matang, misalnya belum jelasnya skenario pembelajaran. Keadaan seperti itu dapat dipastikan menciptakan proses belajar mengajar belum sistematis, prioritas pada hal kesesuaian materi ajar, mengakibatkan peserta didik kesulitan fokus dan kehilangan banyak waktu untuk mendapatkan praktek yang maksimal, ketika situasi mulai normal kembali guru-guru sudah mulai disibukkan kembali dengan mengikuti program merdeka belajar untuk melakukan inovasi dalam pengembangan kurikulum merdeka.

Berdasarkan kenyataan di atas, dapat diprediksi Penerapan merdeka belajar di SMK Negeri 1 Lima Puluh belum berjalan secara maksimal, peneliti berasumsi banyak faktor yang mempengaruhinya dan untuk mengungkap hal itu peneliti merencanakan penelitian dengan Judul “ Manajemen Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Melalui Link and Match SMK Negeri 1 Lima Puluh Dengan IDUKA”.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan persoalan yang terjadi dari suatu peristiwa yang diceritakan pada latar belakang masalah, identifikasi masalah membantu peneliti menemukan persoalan-persoalan yang akan diteliti oleh peneliti berdasarkan judul yang diteliti, berlandaskan latar belakang masalah yang ditemui maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar di SMK belum sesuai dengan kebutuhan IDUKA.
2. Ketua Program Studi dan guru produktif belum membuat analisis capaian pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan IDUKA.
3. Guru kurang memahami konsep penerapan kurikulum merdeka belajar pada SMK dengan menyesuaikan pembelajaran sesuai keadaan kebutuhan IDUKA.
4. Penerapan Praktik Kerja Industri belum mengadopsi aturan terbaru dimana mengharuskan peserta didik mengikuti program prakerin di IDUKA minimal selama 6 bulan.

5. Jumlah guru yang memiliki sertifikat asesor kompetensi sebagai prasyarat pembentukan Tempat Uji Kompetensi (TUK) masih rendah.
6. SMK belum memiliki TUK yang memiliki licensy dari LSP.
7. Peserta didik yang tamat masih belum dibekali dengan sertifikat kompetensi berhologram garuda yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
8. Literasi pembelajaran berbasis Kompetensi Abad 21 masih belum diterapkan pada proses pembelajaran.
9. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar di Sekolah melalui Kerjasama SMK dengan IDUKA masih perlu ditingkatkan lagi.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah adalah pembatasan persoalan dari peristiwa atau kejadian berdasarkan identifikasi masalah pada latar belakang masalah penelitian, batasan masalah mempunyai maksud dan tujuan untuk memberikan batasan yang pasti dari masalah yang diteliti, berlandaskan identifikasi masalah diatas, maka untuk menghindari adanya penafsiran yang melebar, maka masalah yang ditemukan pada penelitian harus dibatasi pada masalah yang lebih fokus yaitu dengan Penerapan Merdeka Belajar dengan adanya keterbatasan, maka untuk penelitian ini membatasi masalah yang diteliti tentang Bagaimana Manajemen Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar melalui Link and Match SMK dengan IDUKA.

D. Fokus Masalah

Fokus masalah adalah untuk mengarahkan tujuan dari sebuah karya tulis ilmiah agar lebih fokus pada pengkajian judul penelitian. Berlandaskan pembatasan masalah tersebut, maka fokus masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana langkah-langkah kepala sekolah, ketua program studi, dan guru produktif dalam mewujudkan link and match dengan IDUKA?
2. Bagaimana konsep guru dalam menganalisis penerapan kurikulum merdeka belajar pada SMK dengan menyesuaikan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan IDUKA?
3. Bagaimana penerapan praktik kerja industri dengan mengadopsi pemerdikbud no. 50 tahun 2020 dimana mengharuskan peserta didik mengikuti program praktek kerja industri di IDUKA minimal selama 6 bulan?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis langkah-langkah kepala sekolah, ketua program studi, dan guru produktif dalam mewujudkan link and match dengan IDUKA.
2. Untuk menganalisis konsep guru dalam menganalisis penerapan kurikulum merdeka belajar pada SMK dengan menyesuaikan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan IDUKA.
3. Untuk menganalisis penerapan Praktik Kerja Industri (PRAKERIN) dengan mengadopsi pemerdikbud no. 50 tahun 2020 dimana mengharuskan peserta

didik mengikuti program praktek kerja industri di IDUKA minimal selama 6 bulan.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat untuk melacak keadaan, alasan, dan konsekuensi terhadap suatu keadaan khusus (Nazir, 2022). Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui proses pendidikan dan pembelajaran di SMK yang menjalin Kerjama dengan IDUKA di masa 4.0 saat ini.
- b. Mampu menjadi rujukan penelitian bagi mahasiswa, guru, dan dosen yang berkehendak akan Manajemen Penerapan Merdeka Belajar pada SMK dan dimasa Revolusi Industri.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis, yaitu:

- a. Sebagai masukan dan bahan informasi untuk Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui program Merdeka Belajar dan Manajemen Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar.
- b. Memberi masukan bagi kepala SMK Negeri 1 Lima puluh pada usaha meningkatkan mutu SDM SMK dalam upaya meningkatkan kualitas

pembelajaran dan mutu pendidikan melalui program Merdeka Belajar yang terencana, terstruktur, dan terukur.

- c. Sebagai masukan dan pengembangan program merdeka belajar bagi guru di sekolah.
- d. Menjadi masukan untuk pimpinan IDUKA bahwa maju mundurnya pendidikan vokasi sangat ditentukan oleh peran serta IDUKA.
- e. Dapat menjadi sumbang pikir untuk penelitian yang berkaitan pada penerapan kurikulum merdeka belajar melalui link and match SMK Negeri 1 lima puluh dengan IDUKA di masa 4.0.

